

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 mengacu pada sejumlah dokumen perencanaan pembangunan. Pertama, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020 mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021, dan Rencana Kinerja Pemerintah Tahun 2020. Kedua, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020 juga merujuk kepada Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB) Tahun 2018-2021 yang merupakan wujud komitmen pemerintah daerah Sulawesi Tengah untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional dan global. Ketiga, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan dan rekonstruksi wilayah-wilayah yang terdampak bencana pada 28 September 2018, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020 juga akan mengacu pada Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pasca Bencana Provinsi Sulawesi Tengah serta persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak pada tahun 2020.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditandai dengan tingkat pendidikan masyarakat yang cukup tinggi terutama tingkat menengah keatas dan kejuruan di samping itu pula terbukanya lapangan pekerjaan yang berimplikasi pada berkurangnya angka pengangguran. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin tinggi sehingga usia harapan hidup turut meningkat, kecukupan gizi serta hilangnya penyakit seperti TBC, BCG, campak dan polio di masyarakat.

Daya saing perekonomian semakin kuat dan kompetitif dengan penerapan teknologi terpadu antara industri pengolahan dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah daerah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh mantapnya jaringan infrastruktur transportasi serta berkembangnya jaringan jalan ke pusat-pusat kegiatan; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga

elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

Prioritas Pembangunan Daerah dalam Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 juga menyikapi persoalan pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19). Pada awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia telah terjangkit penyebaran pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi dan sosial. Dampak yang dirasakan juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri, UMKM, dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah pada Triwulan I-2020. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 yaitu "**SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING**", dengan serangkaian misi:

1. Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi.
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.

4. Mewujudkan Pengelolaan Sumber daya Agribisnis dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Seajar Dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia.
5. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya.

Selanjutnya Misi pembangunan daerah tersebut dapat diurai sebagai berikut:

**1) Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM**

Reformasi birokrasi dan pembangunan hukum serta ketentraman dan ketertiban adalah merupakan salah satu agenda penting pemerintah daerah 5 tahun ke depan yaitu karena pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen yang penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Reformasi tersebut kiranya dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan pelayanan publik, efektifitas dan akuntabilitas.

Pembangunan bidang hukum mencakup proses pembuatan peraturan daerah, proses pengawasan dan juga penegakannya, serta memfasilitasi hukum bagi masyarakat. Pembangunan hukum ini juga mencakup suasana dan kepastian hukum sehingga tercapainya ketentraman dan ketertiban.

**2) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi**

Pembangunan infrastruktur adalah merupakan kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi, ketenagaan listrik, energi, pos telekomunikasi dan informatika, sumber daya air serta perumahan, pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan, merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembangunan infrastruktur memerlukan pendanaan yang sangat besar sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran melalui dana APBN dan pemerintah daerah melalui dana APBD, serta melalui investor swasta dengan salah model *Publik Private Partnership*.

**3) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan**

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka yang menjadi prioritas pemerintah daerah kedepan adalah meningkatkan pertumbuhan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Peranan swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kedepan sangat diharapkan, selain hal tersebut kebijakan untuk mendorong kinerja Usaha Kecil Menengah dan Koperasi juga menjadi prioritas serta peran dan dukungan perbankan juga dibutuhkan dalam upaya meningkatkan dan memajukan Usaha Kecil Menengah melalui penambahan akses terhadap perluasan KUR, meningkatkan bantuan teknis dalam aspek pengembangan produk dan pemasaran.

#### **4) Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia**

Memanfaatkan SDA dan Lingkungan Hidup secara produktif, efisien, optimal berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya**

Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan adalah merupakan salah satu agenda yang menjadi prioritas dimasa pemerintahan mendatang. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dapat dilihat pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tersebut seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi karena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan daya saing serta akan memacu terciptanya kreatifitas dan inovasi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan menciptakan sumber daya manusia berdaya saing sehingga akan tercapainya pembangunan ekonomi yang makin mandiri. Dalam bidang kesehatan juga melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang antara lain ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan turunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Provinsi Sulawesi Tengah pada 5 (lima) tahun depan, yaitu;

**Tujuan I: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)**

Dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien;
- b. Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah;
- c. Terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas pemerintah serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah yang semakin meningkat;
- d. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah;
- e. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk hukum dan perundang-undangan daerah, sosialisasi serta evaluasi produk hukum; serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- f. Terlaksananya penegakan hukum secara adil dan merata;
- g. Terjalannya toleransi inter dan antar umat beragama dan penghargaan pluralitas;
- h. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan yang efektif dan efisien serta terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

**Tujuan II: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata serta Penyediaan Energi Baru Terbaharukan (EBT), dan Sumberdaya Mineral di Seluruh Kabupaten/Kota**

Dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Tersedianya berbagai infrastruktur yang memadai;
- b. Fasilitasi penyediaan energi baru terbaharukan (EBT) diseluruh wilayah.

**Tujuan III: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Aktivitas Ekonomi**

Dengan sasaran sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kesejahteraan petani;
- b) Meningkatnya diversifikasi sistem distribusi dan cadangan pangan masyarakat yang mampu menjaga stabilitas harga pangan sehingga terjangkau bagi masyarakat;
- c) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan budidaya ikan pengolahan hasil perikanan;
- d) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kontribusi bidang kelautan perikanan pada PDRB Provinsi Sulawesi Tengah;

- e) Meningkatnya, pendapatan masyarakat sekitar hutan;
- f) Meningkatnya kontribusi PDRB sektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tengah;
- g) Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
- h) Terwujudnya koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tangguh, berdaya saing, profesional dan mandiri yang memiliki etos dan etika usaha yang baik;
- i) Meningkatnya kemampuan dan daya saing kelembagaan koperasi;
- j) Meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktifitas perdagangan;
- k) Terwujudnya industri yang tangguh, profesional dan mandiri;
- l) Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja;
- m) Terciptanya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja serta hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat;
- n) Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara secara bertahap dalam kurun waktu 5 tahun;
- o) Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan sosial;
- p) Meningkatnya kualitas pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, jaminan sosial bagi penyandang kesejahteraan sosial;
- q) Meningkatnya peran aktif dan dunia usaha dalam ikut serta menangani atau memberikan jaminan dan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- r) Meningkatnya kesetaraan gender dalam bidang pembangunan;
- s) Meningkatnya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan melalui kegiatan investasi pertambangan;
- t) Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa.

**Tujuan IV: *Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Guna Mengoptimalkan Nilai Tambah Ekonomi***

Dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya mutu dan produktivitas sumberdaya hutan serta luas hutan tanaman dalam rangka menurunkan laju degradasi hutan;
- b. Menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan strategi;

- c. Meningkatkan jumlah unit pengelolaan hutan pada tingkat tapak;
- d. Meningkatkan peranserta dan kesadaran masyarakat/para pemangku kepentingan untuk menjaga dan melestarikan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup;
- e. Meningkatkan kedisiplinan masyarakat maupun pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- f. Meningkatkan kapasitas aparatur, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- g. Terselenggaranya Mitigasi, Penanganan Kedaruratan Logistik, serta Peralatan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana;
- h. Terciptanya kawasan konservasi laut dan perairan;
- i. Termanfaatkannya potensi pertambangan yang berkelanjutan;
- j. Terkelolanya potensi SDA yang berwawasan lingkungan dengan pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas).

**Tujuan V: *Mengoptimalkan Mutu Modal Manusia Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana***

Dengan sasaran sebagai berikut:

- a) Tuntasnya angka buta aksara;
- b) Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pengembangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah;
- c) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat;
- d) Meningkatnya kualitas keimanan dan ketakwaan;
- e) Suksesnya keluarga berencana (KB) dan terciptanya keluarga yang berkualitas;
- f) Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan serta prestasi olahraga;
- g) Terciptanya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
- h) Meningkatkan kemampuan aparatur;
- i) Meningkatkan keberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- j) Meningkatnya daya saing petani/nelayan;
- k) Meningkatnya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri;

Secara teknokratis, dokumen RPJMN 2015-2019 sesungguhnya telah selesai diimplementasikan, walau demikian dokumen RPJMN 2015-2019 tetap dapat dijadikan rujukan struktural hingga dokmen RPJMN 2020-

2024 disahkan. Oleh karena itu, visi pembangunan untuk saat ini masih dapat merujuk pada Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yaitu **”Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”** dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 mengusung Tema pembangunan nasional yaitu **”Pembangunan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Dengan fokus pada pembangunan dan pemerataan guna menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Usulan Lima Prioritas Nasional yang menjadi fokus RKP Tahun 2020, yaitu: (1) Pembangunan; (2) Penguatan Konektivitas; (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi; (4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; dan (5) Stabilitas keamanan nasional.

**Tabel. 4.1**  
**Keterkaitan Agendan Prioritas Nasional dengan**  
**Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah**

No	Agenda Prioritas RPJMN 2020-2024	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.	Terbangunnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta harmonisasi politik daerah guna memperkokoh NKRI dan kebangsaan
2	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.	Revitalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan
3	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.	Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM.
4	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.	Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah Kab/kota. Mendukung percepatan Kemandirian Energi baru terbarukan. Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan.
5	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.	Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental.



No	Agenda Prioritas RPJMN 2020-2024	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021
		Revitalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
6	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.	Mewujudkan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat yang terjangkau dan berkualitas.
7	Melakukan revolusi karakter bangsa.	Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental.
8	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.	Pemantapan Iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif dan market friendly.
9	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.	Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan.
		Pemantapan Iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif dan <i>market friendly</i> .
		Melanjutkan pengelolaan sumber daya agribisnis dan maritim yang lestari serta pariwisata dan ekonomi kreatif daerah yang berdaya saing.

Sasaran pembangunan Nasional yang akan dicapai pada Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDB sebesar 5,3 – 5,5 persen.
2. Inflasi, Indeks Harga Konsumen sebesar 2,0 – 4,0 persen.
3. Tingkat kemiskinan menurun menjadi sebesar 8,5 – 9,0 persen.
4. Tingkat pengangguran menjadi sebesar 4,8 - 5,2 persen.

Sasaran pembangunan nasional untuk Sulawesi Tengah Tahun 2020 dengan target:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,25 – 6,50 persen.
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 13,55 – 14,00 persen.
3. Tingkat Pengangguran 4,0 – 4,5 persen.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan maupun pengangguran yang ditargetkan Pemerintah Pusat kepada Sulawesi Tengah, pemerintah daerah akan terus berusaha

mengembangkan potensi unggulan daerah terutama disektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan serta pertambangan.

#### 4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Mengacu kepada sasaran pembangunan nasional yang akan dicapai pada Tahun 2020 serta perwujudan Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA), maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

##### a. Strategi Dan Arah Kebijakan Pariwisata dan Industri (Kawasan Industri dan KEK)

Secara nasional sasaran pembangunan industri ditargetkan lebih tinggi dari pertumbuhan PDB industry pengolahan Tahun 2019 sebesar 8,6 persen dengan share 21,6 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut, jumlah industri berskala menengah dan besar perlu meningkat sekitar 9.000 unit usaha selama 5 tahun ke depan.

Sasaran pembangunan pariwisata adalah dalam meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara Tahun 2019 sebanyak 20 juta orang dan wisatawan nusantara 275 juta orang dengan menyerap devisa 20 milyar USD. Guna mewujudkan sasaran nasional tersebut maka pembangunan Industri dan Pariwisata di Sulawesi Tengah akan dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

**Tabel.4.2**  
**Strategi Dan Arah Kebijakan Perindustrian dan Pariwisata**

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p><b>PERINDUSTRIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan daya saing, efisiensi, produktifitas dan kelembagaan koperasi danUKM.</li> <li>2. Mendorong kesadaran berkoperasi di tengah-tengah masyarakat.</li> <li>3. Penguatan kelembagaan dan usaha sektor perdagangan</li> <li>4. Penguatan kelembagaan dan daya saing Industri berbasis potensi dankemandirian lokal.</li> <li>5. Memperkuat struktur ekonomi dengan peningkatan kontribusi sektorindustri dan perdagangan dalam pembentukan PDRB.</li> <li>6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM Aparatur.</li> <li>7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM Pelaku Usaha disektor Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberdayakan dunia usaha koperasi dan UMKM, melalui aspek permodalan, manajemen dan teknologi yang mampu mendorong pembangunan aktifitas secara berkelanjutan.</li> <li>2. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai sokoguru perekonomian dengan peningkatan citra kelembagaan.</li> <li>3. Perluasan akses perdagangan komoditi daerah yang didukung dengan peningkatan mutu produk menghadapi pasar yang semakin kompetitif.</li> <li>4. Peningkatan stabilitas perdagangan lokal yang menjamin keseimbangan stok kebutuhan masyarakat didukung strategi distribusi yang merata.</li> <li>5. Pemberdayaan Industri melalui aspek permodalan, manajemen dan teknologi yang mampu mendorong perkembangan</li> </ol>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>8. Membangun kompetensi inovasi dan teknologi sehingga dapat berperandalam pertumbuhan ekonomi.</p> <p>9. Meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur dan terlembaga.</p> <p>10. Penguatan dan peningkatan daya saing sektor koperasi.</p> <p>11. Membangun kompetensi inovasi dan teknologi UMKM sehingga dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi.</p> <p>12. Meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha UMKM secara lebih terstruktur dan terlembaga.</p> <p>13. Penguatan dan peningkatan daya saing UMKM.</p> <p>14. Penguatan Usaha sektor industri.</p> <p>15. Peningkatan daya saing Industri</p> <p>16. Pembangunan Industri berbasis potensi dan kemandirian lokal (Industri unggulan dan kompetensi inti daerah).</p> <p>17. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan dan pengembangan ekspor, pengelolaan impor dengan baik, penciptaan iklim investasi dan perdagangan yang lebih kondusif dan peningkatan perlindungan konsumen serta pengamanan pasar.</p> <p>18. Pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan harapan dapat menurunkan kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar daerah dilakukan melalui menjaga kelancaran distribusi bahan pokok dan meminimasi harga antar daerah kabupaten/ kota, fasilitasi UMKM, antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional, pendidikan dan pelatihan ekspor UMKM, perbaikan kemasan produk dan promosi.</p> <p>19. Menata dan peningkatan peran kelembagaan perdagangan melalui kemitraan</p>	<p>aktifitas secara berkelanjutan.</p> <p>6. Perluasan akses industri yang didukung dengan peningkatan mutu produk serta mendorong peranan asosiasi dunia usaha dalam penetapan strategi peningkatan komoditi inti industri dan pengembangan usaha berdasarkan sistem persaingan usaha yang sehat.</p> <p>7. Penguatan struktur ekonomi dengan peningkatan kontribusi sektor industry dan perdagangan dalam pembentukan PDRB.</p> <p>8. Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM Aparatur.</p> <p>9. Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM Pelaku Usaha di sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.</p> <p>10. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi.</p> <p>11. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif.</p> <p>12. Pengembangan produk dan pemasaran koperasi.</p> <p>13. Peningkatan daya saing SDM Koperasi.</p> <p>14. Penguatan kelembagaan koperasi.</p> <p>15. Penguatan kelembagaan Balai. Latihan Kumperindag (UPT -Diklat).</p> <p>16. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM.</p> <p>17. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif.</p> <p>18. Pengembangan produk dan pemasaran UMKM.</p> <p>19. Peningkatan daya saing SDM UMKM.</p> <p>20. Peningkatan investasi UMKM.</p> <p>21. Merevitalisasi sektor industri dan peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian daerah.</p> <p>22. Membangun struktur industri sesuai kompetensi daerah.</p> <p>23. Meningkatkan kemampuan dan mengembangkan industri kecil dan menengah.</p> <p>24. Mendorong pembangunan industri baru.</p> <p>25. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor -sektor pembangunan lain yang terkait di sektor ekonomi dalam pembangunan daerah.</p> <p>26. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui sector perdagangan.</p>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>usaha, distributor, keagenan dan lembaga perlindungan konsumen agar masyarakat dapat terlibat secara luas dalam aktifitas perekonomian.</p> <p>20. Peningkatan peran kemetrolgian dan pengujian sertifikasi mutu barang yang berkualitas.</p>	<p>27. Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.</p> <p>28. Memperluas akses perdagangan komoditi daerah yang didukung dengan peningkatan mutu produk menghadapi pasar yang semakin kompetitif dan mengefektifkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.</p> <p>29. Meningkatkan stabilitas perdagangan lokal yang menjaga keseimbangan stok kebutuhan masyarakat didukung strategi distribusi yang merata sehingga menjamin stabilitas harga.</p> <p>30. Menata dan peningkatan kemetrolgian dan Pengujian sertifikasi mutu barang dalam kegiatan perdagangan.</p>
<p><b>PARIWISATA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah dan terus melakukan upaya pelestarian, pembinaan dan pengembangannya untuk kepentingan pariwisata.</li> <li>2. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.</li> <li>3. Pelayanan prima dan standarisasi mitra usaha jasa pariwisata.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas produk industri kreatif dan pariwisata daerah serta promosi di dalam dan di luar negeri.</li> <li>5. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif guna perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan usaha industry pariwisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.</li> <li>6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi guna mendukung keberhasilan promosi dan pemasaran pariwisata.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal.</li> <li>2. Menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) beserta Naskah Akademis dan Peraturan Daerah (PERDA) tentang RIPPDA yang ditindaklanjuti dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata andalan.</li> <li>3. Pembinaan masyarakat di sekitar objek wisata dan terus meningkatkan upaya pengelolaan objek wisata dan situs kepurbakalaan agar lebih menarik dan mempunyai daya saing yang tinggi.</li> <li>4. Menyelenggarakan/ mendukung pelaksanaan Festival dan Event pariwisata secara regular berdasarkan kalender kegiatan di tingkat kabupaten/kota maupun yang berskala propinsi.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi industri kreatif dan pariwisata di dalam dan di luar negeri.</li> <li>6. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat untuk mendukung gerakan sadar wisata dan program sapta pesona.</li> </ol>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	7. Meningkatkan kualitas produk industri kreatif dan pariwisata termasuk kualitas pelayanan agar mampu bersaing di pasar global.

**b. Strategi Dan Arah Kebijakan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal**

Pembangunan daerah tertinggal sebagai pendekatan pembangunan lintas batas sektor ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju pada 122 kabupaten. Secara Nasional sasaran pembangunan daerah tertinggal adalah:

1. Meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,24 persen pada tahun 2020;
2. Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen pada akhir tahun 2020;
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal rata-rata 69,59 pada tahun 2020; dan
4. Minimal terdapat 80 (delapan puluh) kabupaten dapat dientaskan menjadi kategori kabupaten maju.

Sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Guna mewujudkan sasaran nasional tersebut maka pembangunan Daerah tertinggal dan desa di Sulawesi Tengah akan dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

**Tabel. 4.3  
Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Tertinggal dan Desa**

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p><b>Daerah Tertinggal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal.</li> <li>• Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal.</li> <li>• Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal.</li> <li>• Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kapasitas kegiatan Ekonomi melalui peningkatan arus investasi.</li> <li>• Peningkatan ketersediaan infrastruktur : (Jalan, Jembatan, Energy dan Air).</li> <li>• Peningkatan kualitas manusia dan Peningkatan Birokrasi yang efisien.</li> <li>• Peningkatan kapasitas produksi melalui pengembangan komoditas primer yang mampu menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya.</li> </ul>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan nilai tambah.</li> <li>• Pengembangan Infrastruktur desa.</li> <li>• Peningkatan kualitas manusia</li> <li>• Peningkatan Pemberdayaan masyarakat.</li> <li>• Mendorong Perbaikan Kesejahteraan Tenaga Kerja.</li> <li>• Mendorong Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar.</li> </ul>
<p><b>Pembangunan Desa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan melalui Pembinaan Pengembangan Kapasitas, Pelatihan dan Bimtek Manajemen Pemeritahan Desa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik.</li> <li>2. Mengoptimalkan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam menggerakkan Partisipasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam proses Pembangunan melalui pembinaan, pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) / Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).</li> <li>3. Mewujudkan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat dan Pelestarian Adat istiadat melalui penguatan Pokja Profil desa/Kel, Pokjanal Posyandu, Fungsi Posyandu melalui SIP, Pelaksanaan Lomba Desa/Kel, Harganas, HKG PKK, KB Kes, PMT-AS, Perlindungan Pekerja Anak, Penguatan Kelembagaan HIV AIDS, Penguatan Lembaga Adat.</li> <li>4. Mengoptimalkan Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian pelaksanaan PNPM serta mengoptimalkan Lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah dalam rangka Percepatan Penanggulangan kemiskinan.</li> <li>5. Mengembangkan kelompok usaha ekonomi produktif melalui perluasan LSP-BM, UED- SP, Penguatan institusi Pasar /Pasar Desa, Penguatan Lumbung Pangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi dan melakukan pembinaan Penyelenggaraan Adm. Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik.</li> <li>2. Meningkatkan pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam menggerakkan Partisipasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan.</li> <li>3. Memantapkan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat sesuai tradisi dan Adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan dan ketertiban masyarakat.</li> <li>4. Mendorong kemandirian masyarakat perdesaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai wujud Penanggulangan kemiskinan.</li> <li>5. Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan keluarga, ketahanan pangan Masyarakat, memantapkan manajemen Lembaga Keuangan Mikro (LKM) perdesaan dan usaha-usaha desa serta Pengembangan institusi pasar /pasar desa.</li> <li>6. Mendorong pemyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi masyarakat dalam Pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan.</li> <li>7. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang didukung sarana fasilitasi Kerja yang memadai.</li> </ol>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Masyarakat Desa (LPMD), CPPD dan Bumdes.</p> <p>6. Mengoptimalkan pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan mendayagunakan TTG berbasis kearifan lokal melalui DME, Pamsimas, Hutan Mangrove, Hutan Desa, Kawasan Konservasi dan Pesisir Pelaksanaan Gelar TTG, Gelar Karya Masyarakat, Pengembangan Posyantek, PLTMH, PLTS, LMP.</p> <p>7. Mengutamakan peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan Tupoksi dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pemenuhan Sarana kerja yang memadai serta Pendidikan dan Pelatihan.</p>	

**c. Strategi Dan Arah Kebijakan Kemaritiman**

Pembangunan kelautan dan perikanan kedepan dilaksanakan dengan mengedepankan peran ekonomi kelautan dan sinergitas pembangunan kelautan nasional dengan sasaran sebagai berikut:

1. Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pemba-ngunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masya-rakat pesisir yang difokuskan pada: (i) pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, termasuk promosi, investasi di lokus andalan; (ii) peningkatan kesejahteraan masyarakat di 31 pulau-pulau kecil terluar, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan dasar; (iii) peningkatan keamanan (eksistensi) di 61 pulau kecil terluar lainnya; (iv) penyusunan master plan dan rencana zonasi pulau-pulau kecil, terutama pulau-pulau kecil terluar; (v) peningkatan produksi kelautan dan perikanan sebesar 40-50 juta ton pada 2020 untuk peningkatan ekonomi masyarakat (secara spesifik dijabarkan dalam Isu Strategis Ketahanan Pangan); (v) pengembangan komoditas andalan kelautan lainnya, termasuk pengembangan energi laut (pilotting) di beberapa lokasi terpilih; dan (iv) Pengembangan pelabuhan perikanan skala nasional 24 Pelabuhan Perikanan Nusantara/ Pelabuhan Perikanan Samudra (PPN/PPS).
2. Tersedianya data dan informasi sumber daya kelautan yang terintegrasi (one map policy) dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.

3. Terwujudnya TOL LAUT dalam upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut serta meningkatkan konektivitas laut yang didukung oleh keselamatan maritim yang handal dan manajemen yang bermutu serta industri maritim yang memadai, yang difokuskan pada: (i) peningkatan pelayanan angkutan perintis laut dengan 104 kapal perintis untuk menghubungkan pulau besar dan pulau-pulau kecil pada 193 lintas subsidi perintis angkutan laut serta pengadaan 50 unit sarana kapal penyeberangan perintis; (ii) pengembangan 24 pelabuhan, termasuk Bitung dan Kuala Tanjung sebagai New International Hub serta pengembangan 60 dermaga penyeberangan; dan (iii) terwujudnya kemampuan industri maritim dan perkapalan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam negeri dan ekspor.
4. Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut, melalui: Kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang diutamakan pada: (i) pengutuhan dan penambahan luasan kawasan konservasi laut dari 15,7 juta ha pada tahun 2013 menjadi 20 juta ha pada tahun 2020; (ii) Peningkatan pengelolaan efektif pada sebanyak 35 kawasan konservasi yang telah ditunjuk; dan (iii) pemulihan kawasan pesisir yang rusak sebanyak 85 kawasan, melalui rehabilitasi kawasan pesisir dan pengembangan sabuk pantai.
5. Terwujudnya SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari, difokuskan pada: (i) peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan sekurang-kurangnya 200 ribu orang sampai tahun 2019; (ii) peningkatan Iptek Kelautan dan diseminasi teknologi kelautan; serta (iii) penguatan dan revitalisasi budaya maritim.

Guna mewujudkan sasaran nasional tersebut maka pembangunan maritim dan kelautan di Sulawesi Tengah akan dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:



**Tabel.4.4**  
**Strategi Dan Arah Kebijakan Maritim dan Kelautan**

<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<p>Terdapat 5 (lima) komoditas Kelautan dan Perikanan yang akan dikembangkan di Sulawesi Tengah yakni rumput laut, tuna/ cakalang, udang, ikan demersal dan sidat.</p> <p><b>1) Strategi Pengembangan Rumput Laut</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan cluster industri rumput laut yang dilakukan hulu-hilir berbasis masyarakat dan peran serta dunia usaha.</li> <li>2. Peningkatan konstruksi budidaya, kultur jaringan dan spora dan pasca panen.</li> <li>3. Pengembangan kebun bibit, pabrik karagenan (pergudangan) serta perbaikan/pencetakan tambak dan saluran irigasi.</li> <li>4. Pengembangan industri rumput laut berbasis hulu – hilir berbasis Cluster, mendorong investasi, meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.</li> <li>5. Pengembangan Cluster dilakukan melalui budidaya; industri pengolahan, termasuk pabrikasi Semi-Refined Carrageenan (SRC) serta industri pendukung lain dalam satu kawasan.</li> <li>6. Pengembangan pada 3 (tiga) cluster: (1) Cluster Teluk Tomini; (2) Cluster Teluk Tolo, dan (3) Cluster Selat Makassar-Laut Sulawesi; Rencana Strategis (RENSTRA) 2011-2016.</li> <li>7. Fasilitasi Kementerian Perindustrian RI; untuk pengembangan Pabrik Semi Refine dan Refined Carrageenan;</li> <li>8. Rencana pengembangan industri hilir dan pendukung budidaya (industri tali, pelampung, Refined Carrageenan, dsb) pada Kawasan Ekonomi dan Kawasan Industri Palu (KEKI).</li> </ol> <p><b>2) Strategi Pengembangan Tuna – Cakalang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan SDM pelaku usaha untuk penguasaan IPTEK;</li> <li>2. Penataan Sarana Prasarana TPI/PPI;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penurunan angka kemiskinan Pendekatan: pemberdayaan sosial ekonomi pelaku usaha kelautan dan perikanan.</li> <li>2) Penurunan tingkat pengangguran Pendekatan: optimalisasi penciptaan lapangan kerja di bidang kelautan dan perikanan, dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha.</li> <li>3) Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Pendekatan: industrialisasi perikanan rakyat yang ditunjang oleh inovasi teknologi dan pengembangan infrastruktur dasar.</li> <li>4) Peningkatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan Pendekatan: pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.</li> <li>5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pendekatan: peningkatan kualitas pelatihan, pendidikan dan pelayanan masyarakat kelautan dan perikanan sesuai ukuran standar nasional.</li> </ol> <p>1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapasitas kelembagaan: peningkatan pelayanan publik, pengelolaan keuangan negara, penataan organisasi, dan penciptaan regulasi yang kondusif,</li> <li>b. Pengembangan jejaring kerja, kerjasama antara pusat-daerah, antar SKPD serta membangun kerjasama antar daerah dan internasional.</li> </ol> <p>2) Mengembangkan sentra-sentra agribisnis kelautan dan perikanan berbasis Kawasan Minapolitan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk</li> </ol>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>3. Pengembangan karamba tuna beserta hatchery pendukungnya;</p> <p>4. Pengembangan Outer Ring Fishing Port di Sekitar Laut Sulawesi;</p> <p>5. Penciptaan kawasan minapolitan dan industri perikanan tangkap terpadu pada PPI Donggala; PPI Pagimana dan Calon P3 Ogotua;</p> <p>6. Pemberdayaan nelayan skala 3 – 10 GT untuk Tuna/Cakalang;</p> <p>7. Restrukturisasi armada &gt; 30 GT;</p> <p>8. Pengembangan Teknologi Penangkapan berbasis IPTEK;</p> <p>9. Pengembangan Industri Pengolahan (Processing and Canning);</p> <p>10. Pengembangan Industri Penunjang (Kapal Fiberglass; dan Alat Tangkap Ikan).</p> <p><b>3) Strategi Pengembangan Udang</b></p> <p>1. Peningkatan SDM pelaku usaha untuk penguasaan IPTEK;</p> <p>2. Pengembangan coldstorage, hatchery dan pabrik pakan;</p> <p>3. Pengembangan Tambak Rakyat, melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komoditas Udang Windu (P. Monodon);</li> <li>- Integrasi Polikultur dengan bandeng dan gracilaria;</li> <li>- Penguatan BBU dan produksi benih unggul;</li> <li>- Pengembangan kawasan budidaya, termasuk revitalisasi konstruksi dan saluran tambak;</li> <li>- Stimulan permodalan kerja;</li> <li>- Pendampingan teknis budidaya</li> <li>- Monev Kesling;</li> </ul> <p>4. Pengembangan Tambak Intensif, melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komoditas Udang Vaname (L. vannamei);</li> <li>- Penggunaan teknologi yang efisien ramah lingkungan;</li> <li>- Tax holiday bagi pengembangan investasi.</li> </ul> <p><b>4) Strategi Pengembangan Ikan Demersal</b></p> <p>Produksi Ikan Demersal didominasi oleh Red Snapper, Baramundi, Grouper, Giant Seaperch, Yellowtail Fusilier, Black and Silver Pomfret dan Goat-Fish. Pasar Ikan Demersal , terutama Kerapu Hidup adalah Jepang, Singapura, Hongkong, Cina dan Taiwan sedangkan bentuk frozen dikirim ke Eropa dan Amerika. Pabrik-pabrik Pengolahan (Processing</p>	<p>kelautan dan perikanan;</p> <p>b. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan;</p> <p>c. Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat.</p> <p>3) Meningkatkan kewirausahaan (entrepreneurship) dan skala usaha pelaku usaha kelautan dan perikanan:</p> <p>a. Upaya membangun kepercayaan (trust building) para pelaku usaha; agar dapat memanfaatkan fasilitas kredit dan pembinaan;</p> <p>b. Peningkatan skala usaha di sektor kelautan dan perikanan;</p> <p>c. Pembekalan dan motivasi dilanjutkan dengan pelatihan/magang teknis;</p> <p>4) Meningkatkan penggunaan inovasi teknologi ramah lingkungan dalam upaya peningkatan ketahanan dan keamanan pangan:</p> <p>a. Penguasaan teknologi perikanan kunci peningkatan ketahanan dan keamanan pangan;</p> <p>b. Inovasi teknologi: akuakultur, penangkapan, pengolahan dan pasca panen, konservasi, pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim;</p> <p>c. Kaji terap teknologi inovasi, transfer pada pelaku usaha melalui pendampingan dan penyuluhan.</p> <p>5) Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan:</p> <p>a. Upaya memberikan fasilitas, dorongan atau bantuan teknis dan manajerial;</p> <p>b. Penguatan lembaga keuangan mikro, penggalangan partisipasi masyarakat, dan kegiatan usaha ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal;</p> <p>c. Pemberdayaan untuk peningkatan kemandirian dan kemampuan masyarakat.</p> <p>6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat pelaku usaha kelautan dan</p>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Plant) berorientasi ekspor umumnya berada di daerah Kabupaten Banggai. Terkait dengan itu, maka pengembangan ikan demersal akan diintegrasikan dengan sea ranching berbasis fish home. Sea Ranching merupakan kegiatan terintegrasi antara bidang perikanan tangkap, budidaya, kelautan dan pengawasan. Implementasinya adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan SDM pelaku usaha untuk penguasaan IPTEK;</li> <li>2. Restocking ikan ekonomis penting non ruaya pada kawasan rumah ikan (Fish Homes);</li> <li>3. Rumah Ikan adalah terumbu karang buatan (Artificial Reef), sebagai: (a) alat pengumpul; (b) tempat reproduksi ikan, serta (c) rehabilitasi ekosistem laut;</li> <li>4. Tujuannya adalah untuk (a) konservasi, (b) produksi; dan (c) secara tidak langsung menjaga ketersediaan food chain bagi Tuna dan pelagis besar;</li> <li>5. Poin Strategisnya adalah (a) penyiapan ekosistem berupa pembangunan rumah ikan (Fish Homes); (b) penyiapan kelembagaan masyarakat; (c) restocking ikan spesies ekonomis penting non ruaya; dan (d) penyiapan aturan main pengelolaan kawasan;</li> <li>6. Peningkatan peran swasta khususnya eksportir ikan demersal dalam tata kelola fish home.</li> </ol> <p><b>5) Strategi Pengembangan Sidat</b></p> <p>Sulawesi Tengah disebut sebagai penghasil benih sidat terbesar nasional.</p> <p>Jenis sidat di Sulawesi Tengah didominasi oleh (1) <i>Anguilla celebesensis</i>, (2) <i>Anguilla marmorata</i>, (3) <i>Anguilla bicolor pacifica</i> dan (4) <i>Anguilla bicolor</i>.</p> <p>Tujuan ekspor adalah ke Jepang dan China berkisar 18,09 Ton/tahun dengan perkiraan harga pasar USD 20-30/Kg. Kebutuhan Jepang dan China masing-masing berkisar 100.000 ton/tahun yang didominasi hasil tangkapan, sedangkan budidaya pembesaran masih dikembangkan. Produksi Sidat Sulawesi Tengah Tahun 2010 sebesar 14,3 ton naik</p>	<p>perikanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan interaksi antar anggota dan menguatkan posisi tawar;</li> <li>b. Kemudahan pembinaan, penyampaian informasi, dan diseminasi teknologi;</li> <li>c. Penguatan kelompok menjadi modal bagi ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>dibandingkan tahun 2009 yang hanya 2,2 ton. Implementasinya adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan SDM pelaku usaha untuk penguasaan IPTEK;</li> <li>2. Pengembangan sarana prasarana penangkap benih yang ramah lingkungan;</li> <li>3. Pengembangan sarana prasarana budidaya seperti kaaramba tambak;</li> <li>4. Pengembangan kawasan konservasi Sidat;</li> <li>5. Pengembangan teknologi pembesaran;</li> <li>6. Pengembangan teknologi pengolahan ( unagi, kabayashi dsb).</li> </ol>	

**d. Strategi Dan Arah Kebijakan Kedaulatan Pangan**

Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan adalah:

1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka peningkatan surplus beras agar kemandirian pangan dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga dan industri rumah tangga. Sedangkan produksi ikan untuk mendukung penyediaan sumber protein ditargetkan sebesar 18,8 juta ton pada tahun 2019. Produksi garam rakyat ditargetkan sebesar 4,5 juta ton untuk memenuhi konsumsi garam rumah tangga;
2. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga. Terkait perikanan, akan dikembangkan integrasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) kedalam Sistem Logistik Nasional dan penerapan sistem rantai dingin di 100 sentra perikanan;
3. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019), dengan tingkat konsumsi ikan sebesar 54,5 kg/kapita/tahun;

4. Tersedianya sarana dan prasarana irigasi (Ketahanan Air):
  - a) Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 1 juta hektar;
  - b) Terlaksananya rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi untuk mengembalikan layanan irigasi;
  - c) Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 7,3 juta Ha;
  - d) Terbangunnya 115 ribu hektar jaringan tata air tambak untuk mendukung pengembangan ekonomi maritim dan kelautan;
  - e) Terbangunnya 49 waduk baru.

Guna mewujudkan sasaran nasional tersebut maka pembangunan ketahanan pangan di Sulawesi Tengah akan dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut.

**Tabel.4.5**  
**Strategi Dan Arah Kebijakan Ketahanan Pangan**

<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk komoditas hortikultura dengan Strategi : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revitalisasi Lahan</li> <li>➤ Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan</li> <li>➤ Revitalisasi Infrastruktur dan sarana</li> <li>➤ Revitalisasi SDM</li> <li>➤ Revitalisasi Pembiayaan Pertanian</li> <li>➤ Revitalisasi Kelembagaan Petani</li> <li>➤ Revitalisasi Teknologi dan industri hilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi</li> <li>➤ Mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian</li> <li>➤ Perluasan areal</li> <li>➤ Jaminan kepastian hukum atas lahan</li> <li>➤ Menjamin ketersediaan, kualitas dan harga benih/bibit unggul yang terjangkau</li> <li>➤ Mengembangkan infrastruktur prasarana dan sarana pertanian</li> <li>➤ Peningkatan pengetahuan petani agar dapat meningkatkan kesejahteraannya</li> <li>➤ Mendorong peningkatan serapan fasilitas pembiayaan KUR, PUAP dll</li> <li>➤ Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan petani dan pelaku usaha</li> <li>➤ Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna spesifik lokasi</li> </ul>
b. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk komoditas tanaman pangan dengan strategi: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revitalisasi Lahan</li> <li>➤ Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan</li> <li>➤ Revitalisasi Infrastruktur dan sarana</li> <li>➤ Revitalisasi SDM</li> <li>➤ Revitalisasi Pembiayaan Pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi</li> <li>➤ mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian</li> <li>➤ Perluasan areal</li> <li>➤ jaminan kepastian hukum atas lahan</li> <li>➤ Menjamin ketersediaan, kualitas dan harga benih/bibit unggul yang terjangkau</li> <li>➤ Mengembangkan infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian</li> </ul>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revitalisasi Kelembagaan Petani</li> <li>➤ Revitalisasi Teknologi dan industri hilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan pengetahuan petani agar dapat meningkatkan kesejahterannya</li> <li>➤ Mendorong peningkatan serapan fasilitas pembiayaan KUR, PUAP dll</li> <li>➤ Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan petani dan pelaku usaha</li> <li>➤ Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna spesifik lokasi</li> </ul>
<p>c. Meningkatkan ketersediaan pangan komoditas tanaman dan hortikultura yang rendah residu sesuai SNI organic dengan strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revitalisasi Lahan</li> <li>➤ Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan</li> <li>➤ Revitalisasi Infrastruktur dan sarana</li> <li>➤ Revitalisasi SDM</li> <li>➤ Revitalisasi Pembiayaan Pertanian</li> <li>➤ Revitalisasi Kelembagaan Petani</li> <li>➤ Revitalisasi Teknologidan industri hilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Registrasi kebun</li> <li>➤ Menyediakan benih organik</li> <li>➤ Mengembangkan infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian</li> <li>➤ Meningkatkan pengetahuan petani agar dapat meningkatkan kesejahterannya</li> <li>➤ Mendorong peningkatan serapan fasilitas pembiayaan KUR, PUAP dll</li> <li>➤ Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan petani dan pelaku usaha</li> <li>➤ Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna spesifik lokasi</li> </ul>
<p>d. Meningkatkan mutu dan jumlah produk olahan melalui penerapan GAP, SOP, GHP dan GMP dengan Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revitalisasi SDM</li> <li>➤ Revitalisasi Kelembagaan Petani</li> <li>➤ Revitalisasi Teknologi dan industri hilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan pelayanan pasca panen dan pengolahan dalam rangka meningkatkan mutu dan standar produk tanaman</li> <li>➤ Pengembangan industrihilir beras/tepung, jagung, kedelai, packing house, buah-buahan dan sayuran</li> <li>➤ Sosialisasi penerapan SNI wajib, RSPO, penerapan sistem jaminan mutu (GHP,GMP, GDP) dan sertifikasi komoditas strategis</li> <li>➤ Pengembangan sistem informasi pasar, kemitraan,dan intensifikasi promosi</li> </ul>
<p>e. Meningkatkan SDM aparat dan petani dengan Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revitalisasi SDM</li> <li>➤ Revitalisasi KelembagaanPetani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan SDM petani,pelaku usaha dan aparat pertanian agar sejajar dengan Propinsi maju di Kawasan Timur Indonesia (KTI)</li> <li>➤ Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dan pelaku usaha</li> </ul>
<p>f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan kelembagaan pertanian dengan Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revitalisasi SDM</li> <li>➤ Revitalisasi KelembagaanPetani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan kualitas manajemen dan teknis pembangunan pertanian</li> <li>➤ Meningkatkan kualitasdan kuantitas layananpublik</li> </ul>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p><b>Peternakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan populasi dan produktivitas peternakan;</li> <li>2. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan secara berkelanjutan;</li> <li>3. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner secara berkelanjutan;</li> <li>4. Pengembangan sistim pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan dan produk asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH);</li> <li>5. Pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi hasil peternakan;</li> <li>6. Peningkatan pemanfaatan modal dan pembiayaan serta kemitraan Usaha;</li> <li>7. Pengembangan sistem penerapan jaminan mutu produk hasil olahan yang ASUH;</li> <li>8. Pengembangan teknologi industri pengolahan produk hasil ternak;</li> <li>9. Pengembangan padang penggembalaan dan kebun HMT sebagai kawasan potensi pakan ternak lokal;</li> <li>10. Pengembangan integrasi tanaman pertanian/perkebunan dengan ternak;</li> <li>11. Peningkatan jumlah dan kualitas bibit ternak;</li> <li>12. Peningkatan sarana/prasarana produksi alat dan mesin peternakan;</li> <li>13. Peningkatan Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA);</li> <li>14. Peningkatan usaha penggemukan sapi lokal;</li> <li>15. Penyediaan data dan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan serta pemetaan yang akurat;</li> <li>16. Peningkatan kelembagaan peternakan sumber daya manusia peternakan dan kesehatan hewan;</li> <li>17. Pengembangan teknologi pemanfaatan limbah berwawasan lingkungan;</li> <li>18. Peningkatan dan pelestarian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak ruminansia;</li> <li>2. Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak non ruminansia;</li> <li>3. Mengembangkan usaha penggemukan sapi lokal;</li> <li>4. Meningkatkan populasi dan produktivitas plasma nutfah spesifik daerah;</li> <li>5. Pengembangan pupuk organik dan biogas;</li> <li>6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bibit ternak;</li> <li>7. Meningkatkan Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA);</li> <li>8. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan secara optimal dan berkelanjutan;</li> <li>9. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner secara optimal dan berkelanjutan;</li> <li>10. Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan dan produk asal hewan yang ASUH;</li> <li>11. Meningkatkan pengawasan penyebaran/lalu lintas ternak dan produk olahannya;</li> <li>12. Meningkatkan promosi/pemasaran produk dan pengolahan hasil peternakan yang berdaya saing;</li> <li>13. Meningkatkan pemanfaatan modal dan pembiayaan serta kemitraan usaha;</li> <li>14. Mengembangkan sistem penerapan jaminan mutu produk hasil olahan yang ASUH;</li> <li>15. Meningkatkan pengawasan izin usaha dan mutu produk hasil ternak dan olahannya;</li> <li>16. Mengembangkan teknologi industri rumah tangga/kelompok pengolahan hasil ternak;</li> <li>17. Meningkatkan kelembagaan Peternakan dan Sumber daya Manusia Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>18. Menyediakan data dan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan serta pemetaan yang akurat;</li> <li>19. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi alat dan mesin peternakan;</li> </ol>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
plasma nutfah ternak spesifik daerah.	20. Mengembangkan padang penggembalaan dan kebun HMT sebagai kawasan potensi pakan ternak; 21. Optimalisasi lahan terlantar untuk kawasan peternakan melalui integrasi tanaman pertanian/perkebunan dengan ternak.
<b>PERKEBUNAN</b> 1. Melaksanakan manajemen pembangunan yang bersih, transparan dan bebas KKN. 2. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan perkebunan. 3. Memperluas dan memanfaatkan basis produksi secara berkelanjutan. 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memperdayakan sumberdaya manusia perkebunan. 5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan. 6. Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna. 7. Mempromosikan dan memproteksi komoditas perkebunan.	1. Meningkatkan keterbukaan dalam perumusan dan manajemen pembangunan perkebunan. 2. Peningkatan evaluasi, pengawasan, dan pengendalian manajemen pembangunan perkebunan. 3. Penyelarasan pembangunan perkebunan antar sector dan wilayah. 4. Memperluas dan meningkatkan basis produksi perkebunan secara berkelanjutan. 5. Meningkatkan kinerja aparat perkebunan. 6. Meningkatkan kerja sama. 7. Meningkatkan peran dunia usaha perkebunan. 8. Meningkatkan kelembagaan ekonomi petani perkebunan.

**e. Strategi Dan Arah Kebijakan Kesehatan**

Sasaran nasional yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada 2020 adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Dengan sasaran pokok adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.



Guna mendukung sasaran Program Indonesia Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut.

**Tabel.4.6**  
**Strategi Dan Arah Kebijakan Kesehatan**

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menggerakkan Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem perencanaan yang <i>evidence based</i> (berbasis kondisi riil kesehatan) dengan prinsip transparan dan akuntabel</li> <li>2. Meningkatkan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi</li> <li>3. Meningkatkan kualitas dan mutu sarana pelayanan kesehatan</li> </ol>
Mendorong Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan promosi kesehatan dalam berperilaku hidup yang bersih dan sehat</li> <li>2. Menyiapkan dan mendorong tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang berkualitas guna mendukung pelayanan kesehatan</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan (<i>capacity building</i>) kelembagaan dalam upaya memperluas jangkauan pelayanan kesehatan</li> </ol>
Mencegah Meningkatnya Risiko Penyakit dan Masalah Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di setiap kabupaten/kota.</li> <li>2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu</li> <li>3. Meningkatkan sistem surveilans di setiap wilayah kabupaten/kota</li> </ol>
Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna, Berkeadilan, Merata dan Bermutu dengan Perhatian Khusus Pada Daerah Perdesaan dan Pesisir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan tenaga kesehatan yang tersedia untuk meningkatkan dan menjalin kerjasama dengan sektor terkait</li> <li>2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di sektor pelayanan</li> <li>3. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia untuk meningkatkan cakupan dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta sebagai sarana pusat informasi kesehatan</li> <li>4. Memanfaatkan institusi pendidikan yang ada sebagai mitra untuk mendidik dan mencetak tenaga kesehatan yang berkualitas dan siap didayagunakan</li> </ol>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah, Swasta, Organisasi Dalam Konteks Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar program</li> <li>2. Memanfaatkan Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 29 Tahun 2011 (RAD Percepatan Pencapaian Target MDGs) sebagai alat untuk menjalin kemitraan dan dukungan pembiayaan</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan</li> <li>4. Menyusun suatu regulasi/MOU dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)</li> </ol>

#### **f. Strategi Dan Arah Kebijakan Pendidikan**

Secara nasional sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada adalah:

1. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah;
4. Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
5. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
6. Meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri;
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar;

8. Meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus;
9. Meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan tersusunnya peraturan perundangan terkait Wajib Belajar 12 Tahun.

Untuk menunjang sasaran tersebut serta memperhatikan permasalahan yang masih terdapat pada pengembangan bidang pendidikan maka Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan strategis serta arah kebijakan pembangunan pendidikan seperti dalam tabel berikut:

**Tabel.4.7**

**Strategi Dan Arah Kebijakan Pendidikan**

<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat tata kelola pelaksanaan sistem pendidikan.</li> <li>2. Menyediakan dan meningkatkan sarana pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh kabupaten/kota.</li> <li>3. Menyediakan dan meningkatkan prasarana yang merata, berkualitas dan berdaya saing di seluruh kabupaten/kota.</li> <li>4. Menyediakan dan meningkatkan subsidi pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh kabupaten/kota.</li> <li>5. Menjamin terselenggaranya sistem pembelajaran yang dapat membangun karakter peserta didik dan tenaga pendidik dalam segala jenis dan jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah.</li> <li>6. Meningkatkan sarana dan prasarana Dikdasmenjur serta sarana olahraga dan pembinaan klub olahraga usia dini pada SD,MI,SMP dan MTs.</li> <li>7. Memberikan subsidi dan imbal swadaya agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan layanan pendidikan dasar yang dapat dijangkau oleh masyarakat.</li> <li>8. Menyiapkan layanan pendidikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Peningkatan kapasitas, daya tampung dan modernisasi lembaga-lembaga satuan program pendidikan dan kebudayaan;</li> <li>(2) Peningkatan kapasitas dan modernisasi kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan serta sarana penunjang lainnya, pada setiap satuan program pendidikan dan kebudayaan;</li> <li>(3) Peningkatan kapasitas dan modernisasi proses-proses administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan dan kebudayaan, baik pada tingkatan SKPD pengelola pembangunan pendidikan, maupun pada tingkatan satuan program pendidikan dan kebudayaan. <ol style="list-style-type: none"> <li><b>a. Pendidikan Anak Usia Dini</b> Kebijakan dalam pendidikan prasekolah/PAUD, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung kelembagaan PAUD sampai ke tingkat RW di seluruh pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perluasan daya tampung kelembagaan PAUD non formal dan berbasis keagamaan (TKA , RA, Kober, dan Pos PAUD);</li> <li>2) Peningkatan jumlah gedung/kelas, dan sarana perlengkapan bermain pada TK/TKA/RA, dan PKBM, SKB, dan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>alternatif khususnya bagi masyarakat kurang beruntung (masyarakat miskin, terisolir, suku terasing, minoritas, daerah bencana dan konflik dan anak jalanan) seperti SD dan MI kecil / terpadu / kelas jauh dan SMP dan MTs Terbuka.</p> <p>9. Melaksanakan restrukturisasi dan regruping SD agar tercapai efisiensi dan efektifitas sekolah yang didukung fasilitas memadai.</p> <p>10. Memberikan beasiswa bakat dan prestasi serta bantuan lainnya kepada siswa.</p> <p>11. Meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya.</p> <p>12. Melaksanakan dan mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Muatan Lokal.</p> <p>13. Meningkatkan penyediaan, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan seperti buku bacaan, buku mata pelajaran pokok, alat pendidikan, laboratorium dan ruangan lainnya.</p> <p>14. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar melalui penataan sekolah, penilaian proses dan hasil secara bertahap dan berkelanjutan.</p> <p>15. Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan akuntabilitas, monitoring serta evaluasi</p> <p>16. Memperbaiki manajemen pendidikan dasar dengan melaksanakan desentralisasi pendidikan, peningkatan peran komite sekolah, mengembangkan MPMBS dan partisipasi masyarakat serta memberdayakan personal dan lembaga melalui pelatihan.</p> <p>17. Memperluas dan meningkatkan mutu layanan serta pemberdayaan Pusat Pendidikan Anak Dini Usia (PADU).</p>	<p>Pesantren penyelenggara TPA/Kober/Pos PAUD;</p> <p>3) Peningkatan jumlah alat peraga edukatif (APE) proses pembelajaran PAUD;</p> <p>4) Peningkatan jumlah guru/pengasuh/pembimbing pada kelembagaan PAUD;</p> <p>5) Penyediaan fasilitas beasiswa bagi anak tidak mampu untuk mendapatkan PAUD;</p> <p><b>b. Pendidikan Dasar</b></p> <p>Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung dalam rangka percepatan penuntasan wajar dikdas 9 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah dan daya tampung SD/MI, SMP/MTs, SDLB/SMPLB, SLB Autis, SD-SMP satu atap, SDLB-SMPLB satu atap, pusat pendidikan anak korban narkoba, atau MI-MTs satu atap dan SMP-MTs Terbuka sampai ke tingkat pedesaan; 2) Perluasan program pendidikan MDA/MDW, Paket A/B, bagi anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib belajar; 3) Peningkatan jumlah UGB/RKB dan sarana perlengkapan pada sekolah-sekolah, PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara satuan pendidikan dasar; 4) Peningkatan jumlah peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih, serta sarana peribadatan yang mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar; 5) Peningkatan jumlah guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar; 6) Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan yang berprestasi dalam penuntasan wajar dasar; 7) Penyediaan beasiswa bagi anak tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan dasar dan anak berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.</p>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>18. Melanjutkan pemberantasan buta aksara latin dan angka melalui Program keaksaraan Fungsional.</p> <p>19. Meningkatkan pelaksanaan Program Kejar Paket A dan Paket B dalam rangka menunjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.</p> <p>20. Memperluas dan meningkatkan mutu ketrampilan melalui pendidikan berbasis masyarakat luas.</p> <p>21. Memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan perempuan.</p> <p>22. Meningkatkan mutu tenaga kependidikan luar sekolah dan pemuda melalui pendidikan dan pelatihan jangka pendek dan jangka panjang tugas belajar.</p> <p>23. Memperluas pelayanan dan meningkatkan kemampuan kelembagaan Sanggar kegiatan belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), Kursus dan Pelatihan serta satuan pendidikan Non Formal sejenis.</p> <p>24. Meningkatkan mutu Paket A, B dan C non usia sekolah (ex-ujian persamaan, instansi pertanian, transmigrasi, kelautan, anak jalanan, rumah kumuh dan pengungsi).</p>	<p><b>c. Pendidikan Menengah</b></p> <p>Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam melayani pendidikan bagi anak usia 16-18 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Perintisan dan mengembangkan jumlah sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK/MAK) modern, atau satuan program pendidikan menengah terpadu berbasis keunggulan; 2) Pembangunan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah-sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah); 3) Peningkatan jumlah peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah; 4) Peningkatan jumlah guru/ pelatih/ ustadz/ tutor/ pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan pendidikan menengah; 5) Pemerataan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan berprestasi dalam perintisan wajar pendidikan menengah; 6) Penyediaan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah.</p> <p><b>f. Pendidikan Keaksaraan</b></p> <p>Kebijakan dalam pendidikan keaksaraan, diprioritaskan pada percepatan penuntasan program keaksaraan bagi kelompok masyarakat golongan dewasa, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah kelompok-kelompok sasaran program keaksaraan fungsional sampai ke pelosok pedesaan; 2) Peningkatan jumlah sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan pada satuan program</p>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	pendidikan keaksaraan fungsional; 3) Peningkatan jumlah tutor/pelatih/fasilitator dan TLD pada program keaksaraan fungsional.

**g. Strategi Dan Arah Kebijakan Kedaulatan Energi**

Sasaran utama nasional terkait penguatan ketahanan energi yang ingin dicapai 2020 adalah: (i) menguatnya ketersediaan energi primer dari produksi minyak bumi yang didukung oleh produksi gas bumi dan batubara; (ii) meningkatnya pemanfaatan sumber energi primer untuk penggunaan di dalam negeri; (iii) terpenuhinya rasio elektrifikasi mencapai 96,6 persen.

Sasaran peningkatan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) terdiri atas: (i) bauran EBT sebesar 10-16 Persen; (ii) kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT (PLTP, PLTA dan PLTMH) sebesar 7,5 GW; (iii) pelaksanaan pilot project reaktor daya PLTN dengan kapasitas sekitar 10 MW ; (iv) pelaksanaan pilot project pembangkit listrik tenaga arus laut minimal 1 MW; dan Sasaran lainnya adalah pengurangan subsidi energi yang terdiri atas: (i) penurunan besaran subsidi BBM; (ii) penurunan kapasitas pembangkit listrik yang menggunakan BBM menjadi tinggal 2,04 persen.

Guna mendukung sasaran yang hendak dicapai tersebut diatas maka Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan strategis dan arah kebijakan sebagai berikut.

**Tabel.4.8  
Strategi Dan Arah Kebijakan Kedaulatan Energi**

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana energi dan sumber daya mineral.	1. Memastikan kecukupan ketersediaan tenaga listrik untuk jangka menengah serta mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan.
2. Memfasilitasi peningkatan pemanfaatan pengembangan energi dan sumber daya mineral.	2. Memberi bantuan pembangunan PLTMH pada daerah yang mempunyai potensi tenaga air dan bantuan PLTS kepada masyarakat kurang mampu pada daerah yang belum di aliri listrik jaringan PLN.
3. Mendorong penyelidikan dan pemetaan geologi, energi dan sumber daya mineral untuk meningkatkan data cadangan potensi serta melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data potensi geologi, energi dan sumber daya mineral.	3. Meningkatkan Kegiatan Survei Geologi, energi dan sumber daya mineral untuk mendapatkan data cadangan potensi yang akurat.
4. Meningkatkan program efisiensi dan konservasi energi dan sumber daya mineral.	4. Meningkatkan budaya hemat energi bagi masyarakat, instansi pemerintah, swasta dan mendorong
5. Meningkatkan pelayanan	

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>informasi geologi, energi dan sumber daya mineral baik untuk keperluan eksplorasi, penataan ruang, mitigasi bencana alam geologi dan konservasi.</p> <p>6. Mencegah kerusakan lingkungan dengan melakukan <i>Good Mining Practices</i>.</p> <p>7. Meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya aparatur sektor energi dan sumber daya mineral.</p>	<p>pengembangan infrastruktur energi terbarukan yang bertumpu kepada masyarakat.</p> <p>5. Menyiapkan data informasi geologi, energi dan sumber daya mineral.</p> <p>6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku tambang yang baik dan benar yang berwawasan lingkungan.</p> <p>7. Memberikan kesempatan kepada aparatur dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengembangkan diri melalui jalur pendidikan formal, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) teknis sesuai dengan kebutuhan di bidang energi dan sumber daya mineral.</p>

#### **h. Strategi Dan Arah Kebijakan Revolusi Mental**

Hakikat revolusi mental, adalah pembangunan manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik sebagai perwujudan warga negara yang baik. Revolusi mental dapat dijalankan melalui pendidikan, selain melalui kebudayaan, yang kemudian diturunkan ke sistem persekolahan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sistem persekolahan sebagai turunan dari sistem pendidikan harus mampu menumbuhkan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa.

Secara Nasional sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan revolusi karakter bangsa adalah:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik;
2. Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;
3. Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;

4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang tercermin pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama di kalangan siswa-siswa di sekolah;
5. Meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
6. Meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja;
7. Meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi; dan
8. Meningkatnya budaya inovasi di masyarakat.

Guna mendukung sasaran yang hendak dicapai tersebut diatas maka Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan strategis dan arah kebijakan sebagai berikut.

**Tabel.4.9**  
**Strategi Dan Arah Kebijakan Revolusi Mental**

<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menumbuhkan jiwa kebangsaan dan dan mengiatkan kembali nilai-nilai toleransi di masyarakat.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur.</li> <li>3. Menggiatkan dan mengembangkan pendidikan Harmoni</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan pendidikan sejarah perjuangan tadulako Sulawesi Tengah dan Pahlawan Daerah Lainnya;</li> <li>b. Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran; dan</li> <li>c. Penyelenggaraan pendidikan kewargaan melalui organisasi sosial-kemasyarakatan yang berorientasi untuk memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan warga negara dalam rangka meneguhkan jati diri bangsa melalui pemahaman mengenai nilai-nilai multikulturalisme dan penghormatan pada kemajemukan social;</li> </ol>



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Menumbuhkan kembali rasa kebersamaan, tolong menolong, diantara masyarakat dengan Jum'at bersih dll</li> <li>e. Menghidupkan kembali slogan Nosarara Nosarara Nosabatutu, Sintuvu Maroso Belu Rapovia Belo Rakava, dan lainnya</li> <li>f. peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikan agama untuk memantapkan pemahaman ajaran agama, menguatkan internalisasi nilai-nilai agama, menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia, serta menumbuhkan sikap dan perilaku beragama yang toleran dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda;</li> <li>g. menyempurnakan kandungan yang memperkaya pandangan, memupuk toleransi dan membangun harmoni serta saling memahami antarumat beragama;</li> </ul>

#### 4.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah berdasarkan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dirumuskan **10 (sepuluh) Agenda prioritas pembangunan daerah yaitu :**

1. Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Serta Terwujudnya Kepastian Hukum Dan Perlindungan HAM;
2. Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan;
3. Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota;
4. Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan;
5. Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
6. Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan Market Friendly;

7. Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing;
8. Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan;
9. Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau Dan Berkualitas.

Kesepuluh prioritas pembangunan tersebut diimplementasikan dalam 35 (tiga puluh lima) Program Aksi, sebagai berikut.

**PRIORITAS 1:** Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Bersih dan Melayani Serta Terwujudnya Kepastian Hukum dan Perlindungan HAM, untuk mewujudkannya didukung oleh beberapa program aksi utama, sebagai berikut;

NO	PROGRAM AKSI	PERANGKAT DAERAH (PD)	PD PENDUKUNG
1	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Badan Kepegawaian Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
2	Penerapan Pengelolaan E-Government Dan E-Budgeting Dalam Rangka Transparansi Dan Akuntabilitas Publik	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pendapatan daerah Biro Adm. Pembangunan dan SDA Biro Perekonomian
3	Melanjutkan Sistem Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Daerah Berbasis Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Inspektorat Daerah Biro Organisasi
4	Optimalisasi Dan Penyerasian Koordinasi, Sinergitas Dan Harmonisasi Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Dan Pusat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Dinas Pendapatan daerah

**PRIORITAS 2:** Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan.

NO	PROGRAM AKSI	PERANGKAT DAERAH (PD)	PD PENDUKUNG
1	Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Mediator Dalam Penyelesaian Konflik/ Masalah Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Biro Bina Administrasi Kewilayahan Biro Hukum	Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Biro Otonomi Daerah
2	Peningkatan Harmonisasi Hubungan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah Dan DPRD Serta Peningkatan Peran Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (FORKOPIMDA)	Sekretariat DPRD Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Badan Penghubung Biro Umum
3	Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Dalam Rangka Penyelesaian Tindakan Penyelewengan	Inspektorat Daerah	Biro Adm. Pembangunan Biro Organisasi
4	Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Memperkokoh NKRI	Satuan Polisi Pamong Praja Biro Hukum	Biro Organisasi

**PRIORITAS 3:** Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota.

NO	PROGRAM AKSI	PERANGKAT DAERAH (PD)	PD PENDUKUNG
1	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Strategis Daerah Bagi Kemajuan Daerah	Dinas Bina Marga dan penataan Ruang Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi informatika persandian dan statistik
2	Fasilitasi Ketersediaan Akses Informasi Dan Komunikasi Khususnya Pada Daerah Terpencil Dan Tertinggal	Dinas Komunikasi informatika persandian dan statistik	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Biro Adm. Kewilayahan Badan Penghubung

**PRIORITAS 4:** Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan.

NO	PROGRAM AKSI	PERANGKAT DAERAH (PD)	PD PENDUKUNG
1	Fasilitasi Instalasi Jaringan Listrik Dalam Daerah Dan Dukungan Penyediaan Energi Baru Terbaharukan Khususnya Pada Daerah Terpencil Dan Tertinggal.	Dinas ESDM	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**PRIORITAS 5:** Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

NO	PROGRAM AKSI	PERANGKAT DAERAH (PD)	PD PENDUKUNG
1	Pengembangan dan Pendayagunaan Ekonomi Desa serta Penataan Lembaga dan Fasilitasi Kerjasama Desa Dengan Prinsip Revolusi Mental Berdesa.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pariwisata Biro Adm. Pembangunan dan SDA  Biro Adm. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan
2	Desa Membangun Dan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bappeda	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan
3	Pengembangan Dan Pemberdayaan UKM Dan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Penciptaan Lapangan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber daya Manusia

**PRIORITAS 6:** Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan *Market Friendly*.

NO	PROGRAM AKSI	PERANGKAT DAERAH (PD)	PD PENDUKUNG
1	Optimalisasi Peran Penanaman	Dinas Penanaman Modal	Biro Adm.

NO	PROGRAM AKSI	PERANGKAT DAERAH (PD)	PD PENDUKUNG
	Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perekonomian Biro Adm. Pembangunan dan SDA
2	Pengembangan Kawasan Industri Dalam Rangka Mewujudkan Industri Daerah Yang Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan Penghubung	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Biro Adm. Perekonomian Biro Adm. Pembangunan dan SDA
3	Pemerataan Wilayah Pembangunan Berbasis Pengembangan Kawasan Strategis Daerah Dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Biro Bina Administrasi Kewilayahan

**PRIORITAS 7:** Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing.

NO	PROGRAM AKSI	PERANGKAT DAERAH (PD)	PD PENDUKUNG
1	Optimalisasi Pengembangan Agribisnis Dan Pertanian (Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Kehutanan)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Kehutanan	Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian
2	Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian
3	Optimalisasi Pengelolaan Destinasi Dan Pemasaran Pariwisata Daerah	Dinas Pariwisata	Badan Penghubung
4	Optimalisasi Distribusi Perdagangan Dan Meningkatkan Ekspor Produk Unggulan Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PROGRAM AKSI	PERANGKAT DAERAH (PD)	PD PENDUKUNG
			Biro Adm. Perekonomian
5	Menjaga Ketahanan Pangan, Penanganan Kerawanan Dan Keamanan Pangan	Dinas Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Peternakan

**PRIORITAS 8:** Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan.

NO	PROGRAM AKSI	PERANGKAT DAERAH (PD)	PD PENDUKUNG
1	Optimalisasi pengelolaan sumber daya hutan, pengembangan perhutanan sosial dan perencanaan, pengendalian serta pembinaan pengawasan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan	Dinas Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup	Biro Adm. Pembangunan dan SDA
2	Penataan pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara serta revitalisasi pertambangan rakyat	Dinas ESDM	Dinas Lingkungan Hidup
3	Optimalisasi penanganan bencana dan pemulihan trauma bagi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana	Dinas Sosial

**PRIORITAS 9:** Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

NO	PROGRAM AKSI	PERANGKAT DAERAH (PD)	PD PENDUKUNG
1	Peningkatan Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan

NO	PROGRAM AKSI	PERANGKAT DAERAH (PD)	PD PENDUKUNG
			Sumber daya Manusia
2	Peningkatan Kerjasama Dan Jejaring Dengan Perguruan Tinggi Dan Lembaga Riset Dalam Mendorong Daya Saing Daerah	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penghubung Badan Pengembangan Sumber daya Manusia
3	Pelestarian Tradisi Budaya Lokal Dan Pembinaan Lembaga Adat Serta Budaya Gemar Membaca	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Pariwisata
5	Optimalisasi Peran Pemuda Dalam Pembangunan Dan Peningkatan Prestasi Olahraga Unggulan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**PRIORITAS 10:** Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau Dan Berkualitas.

NO	PROGRAM AKSI	PERANGKAT DAERAH (PD)	PD PENDUKUNG
1	Optimalisasi Upaya Kesehatan, SDM, Kesehatan, Sarana Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.	Dinas Kesehatan	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan Dinas Sosial
2	Optimalisasi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Dan Rehabilitasi Sosial Serta Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan
3	Optimalisasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Dan KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PROGRAM AKSI	PERANGKAT DAERAH (PD)	PD PENDUKUNG
			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Percepatan Unggulan Daerah yang dilaksanakan secara tematik, holistic, integrative, dan spasial sebagai berikut;

- 1) Pengembangan UKM melalui penjaminan Modal Usaha Rakyat.
- 2) Kartu Petani Maju (antara lain: Pupuk dan Obat-Obatan Bersubsidi).
- 3) Kartu Nelayan Maju (antara lain: Bahan Bakar Solar Bersubsidi).
- 4) Kartu Buruh Maju (antara lain: pelatihan dan pendidikan gratis).
- 5) Memberikan Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- 6) Sekolah murah dan berkualitas untuk SMU/SMA/SMK dan MA (Di luar dana BOS).
- 7) Melanjutkan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan kemandirian Desa.
- 8) Melanjutkan Pembangunan dan Perbaikan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan antarwilayah.
- 9) Fasilitasi sumber energi baru terbarukan bagi masyarakat.

#### **4.4 Prioritas Program Lintas Bidang dan Lintas Wilayah**

##### **4.4.1. Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung**

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan inovasi program penanggulangan kemiskinan berbasis Bedah Kampung. Program bedah kampung dilaksanakan melalui belanja tidak langsung pada pos bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota.

##### **4.4.2. Program Sulteng Maju**

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggagas program percepatan pembangunan untuk mensejajarkan diri dengan provinsi maju di Kawasan Timur Indonesia melalui program unggulan daerah untuk mempercepat peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, nelayan serta buruh serta melalui program lintas SKPD “Program Sulteng Maju”.



#### **4.4.3. Program Sulteng Bersaing**

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggagas program percepatan pembangunan melalui program peningkatan kemampuan tenaga kerja daerah dan memiliki daya saing yang diberi nama “Program Sulteng Bersaing”

#### **4.4.4. Program Sulteng Sejuta Sapi**

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggagas program dalam mendukung swasembada daging nasional melalui “Program Sulteng Sejuta Sapi”

#### **4.5 Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB) Provinsi Sulawesi Tengah 2018-2021**

Pembangunan global yang selanjutnya disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru untuk periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*).

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Tanpa Kemiskinan
- 2) Tanpa Kelaparan
- 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 4) Pendidikan Berkualitas
- 5) Kesetaraan Gender
- 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 7) Energi Bersih dan Terjangkau
- 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- 10) Berkurangnya Kesenjangan
- 11) Kota dan Permukiman Berkelanjutan
- 12) Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

- 13) Penanganan Perubahan Iklim
- 14) Ekosistem Lautan
- 15) Ekosistem Daratan
- 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
- 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Agenda Pembangunan Berkelanjutan menjadi acuan dan diselaraskan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021, dengan fokus pada pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender serta upaya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah. RPJMD 2016-2021 telah memuat seluruh goals yang ada pada TPB/SDGs. Sinergi antara Program Prioritas, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 dan TPB/SDGs adalah sebagai berikut.

<b>RPJMD</b>	<b>Prioritas Pembangunan</b>	<b>TPB/SDGs</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan Reformasi Birokrasi menuju Birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya Hukum dan Perlindungan HAM;</li> <li>- Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat;</li> <li>- Penerapan Pengelolaan E-Government Dan E-Budgeting Dalam Rangka Transparansi Dan Akuntabilitas Publik;</li> <li>- Melanjutkan Sistem Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Daerah Berbasis Tunjangan Kinerja Daerah (TKD);</li> <li>- Optimalisasi Dan Penyerasian Koordinasi, Sinergitas Dan Harmonisasi Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Daerah dan Pusat.</li> </ul>	<p>1. Percepatan Reformasi Birokrasi menuju Birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya Hukum dan Perlindungan HAM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- G16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh NKRI Dan Kebangsaan;</li> <li>- Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam</li> </ul>	<p>2. Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh NKRI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- G16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh;</li> <li>- G6. Kesetaraan Gender.</li> </ul>

RPJMD	Prioritas Pembangunan	TPB/SDGs
<p>Pencegahan Dan Mediator Dalam Penyelesaian Konflik/Masalah Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revitalisasi Pemberdayaan, penguatan dan perlindungan perempuan dan anak mempersiapkan generasi emas;</li> <li>- Peningkatan Harmonisasi Hubungan Dalam Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Serta Peningkatan Peran Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (FORKOPIMDA);</li> <li>- Penyelenggaran Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Dalam Rangka Pencegahan Tindakan Penyelewengan;</li> <li>- Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Memperkokoh NKRI;</li> </ul>	<p>Dan Kebangsaan.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akselerasi Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Serta Penataan Ruang Guna Konektivitas Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kabupaten/Kota;</li> <li>- Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis Daerah Bagi Kemajuan Daerah;</li> <li>- Fasilitasi perumahan rakyat dan kawasan Permukiman serta penyediaan air bersih;</li> <li>- Fasilitasi Ketersediaan Akses Informasi Dan Komunikasi Khususnya Pada Daerah Terpencil dan Tertinggal.</li> </ul>	<p>3. Akselerasi Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Serta Penataan Ruang Guna Konektivitas Dan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kabupaten/Kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- G1. Tanpa Kemiskinan;</li> <li>- G2. Tanpa Kelaparan;</li> <li>- G6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;</li> <li>- G7. Energi Bersih dan Terjangkau;</li> <li>- G8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;</li> <li>- G9. Industri, Inofasi dan Infrastruktur;</li> <li>- G10. Berkurangnya ketimpangan;</li> <li>- G11. Kota dan permukiman berkelanjutan.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendukung Percepatan Kemandirian Energi Baru Terbarukan;</li> <li>- Fasilitasi Instalasi Jaringan Listrik Dalam Daerah Dan Dukungan Penyediaan</li> </ul>	<p>4. Mendukung Percepatan Kemandirian Energi Baru Terbarukan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- G7. Energi Bersih dan Terjangkau;</li> <li>- G8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonom;</li> </ul>

RPJMD	Prioritas Pembangunan	TPB/SDGs
Energi Baru Terbaharukan Khususnya pada Daerah Terpencil dan Tertinggal.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- G9. Industri, inofasi dan Infrastruktur;</li> <li>- G10. Berkurangnya kesejangan;</li> <li>- G11. Kota dan permukiman berkelanjutan;</li> <li>- G12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengentasan Kemiskinan;</li> <li>- Pengembangan Dan Pendayagunaan Ekonomi Desa Serta Penataan Lembaga dan Fasillitasi Kerjasama Desa dengan Prinsip Revolusi Mental Berdesa;</li> <li>- Desa Membangun dan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;</li> <li>- Pembinaan Dan Pemberdayan UMKM dan Koperasi;</li> <li>- Penciptaan Lapangan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.</li> </ul>	5. Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengentasan Kemiskinan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- G1. Tanpa Kemiskinan;</li> <li>- G2. Tanpa Kelaparan;</li> <li>- G8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan Ekonomi;</li> <li>- G9. Industri, Inovasi, dan infrastruktur;</li> <li>- G10. Berkurangnya Kesenjangan;</li> <li>- G11. Kota dan permukiman Berkelanjutan.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan <i>Market Friendly</i>;</li> <li>- Optimalisasi Peran Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);</li> <li>- Pengembangan Kawasan Industri Dalam Rangka Mewujudkan Industri Daerah Yang Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing;</li> <li>- Pemerataan Wilayah Pembangunan Berbasis Pengembangan Kawasan Strategis Daerah Dan Transmigrasi;</li> </ul>	6. Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan <i>Market Friendly</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- G7. Energi Bersih dan Terjangkau;</li> <li>- G8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;</li> <li>- G9. Industri, inofasi dan Infrastruktur;</li> <li>- G10. Berkurangnya kesejangan.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah yang Berdaya Saing;</li> </ul>	7. Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim serta Pariwisata dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- G1. Tanpa Kemiskinan;</li> <li>- G2. Tanpa Kelaparan;</li> </ul>

RPJMD	Prioritas Pembangunan	TPB/SDGs
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi Pengembangan Agribisnis Dan Pertanian (Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Kehutanan);</li> <li>- Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;</li> <li>- Optimalisasi Pengelolaan Destinasi Dan Pemasaran Pariwisata Daerah;</li> <li>- Optimalisasi Distribusi Perdagangan Dan Meningkatkan Ekspor Produk Unggulan Daerah;</li> <li>- Menjaga Ketahanan Pangan, Penanganan Kerawanan Dan Keamanan Pangan.</li> </ul>	<p>Ekonomi Kreatif Daerah yang Berdaya Saing</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- G7. Energi Bersih dan Terjangkau;</li> <li>- G8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;</li> <li>- G9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;</li> <li>- G10. Berkurangnya Kesenjangan.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan;</li> <li>- Optimalisasi pengelolaan sumber daya hutan, pengembangan perhutanan sosial dan perencanaan, pengendalian serta pembinaan dan pengawasan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;</li> <li>- Penataan pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara serta revitalisasi pertambangan rakyat;</li> <li>- Optimalisasi penanganan bencana dan pemulihan trauma bagi korban bencana.</li> </ul>	<p>8. Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- G13. Perubahan Iklim dan dampaknya;</li> <li>- G14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan;</li> <li>- G15. Melindungi merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai SPM (Isi, Proses, Kompetensi Lulusan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana, Serta Manajemen Pengelolaan Yang Baik);</li> <li>- Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal;</li> <li>- Peningkatan Kerjasama dan Jejaring Dengan Perguruan Tinggi Dan Lembaga Riset dalam Mendorong Daya Saing Daerah;</li> <li>- Pelestarian Tradisi Budaya Lokal Dan Pembinaan Lembaga Adat Serta Budaya</li> </ul>	<p>9. Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai SPM (Isi, Proses, Kompetensi Lulusan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana, Serta Manajemen Pengelolaan Yang Baik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- G1. Tanpa kemiskinan;</li> <li>- G4. Pendidikan Berkualitas.</li> </ul>

RPJMD	Prioritas Pembangunan	TPB/SDGs
Gemar Membaca; - Optimalisasi Peran Pemuda Dalam Pembangunan Dan Peningkatan Prestasi Olahraga Unggulan;		
- Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau dan Berkualitas; - Optimalisasi Upaya Kesehatan, Sdm Kesehatan, Sarana Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat; - Optimalisasi Pembedayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Dan Rehabilitasi Sosial Serta Perlindungan dan Jaminan Sosial; - Optimalisasi berdayaan Keluarga Sejahtera dan KB.	10. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau dan Berkualitas.	- G1. Tanpa Kemiskinan; - G2. Tanpa Kelaparan; - G3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera; - G5. Kesetaraan Gender; - G6. Air Bersih dan sanitasi layak.

Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen melaksanakan TPB/SDGs dalam upaya transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs tidak hanya sangat penting bagi rakyat Indonesia yang terefleksi dari sinergitas antara Program prioritas daerah dengan SDGs, namun juga merupakan wujud kontribusi Provinsi Sulawesi Tengah bagi komunitas Nasional. Lebih lanjut, TPB/SDGs juga menjadi instrumen untuk peningkatan Kerjasama yang menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah Maju Mandiri dan berdaya saing di Kawasan Timur Indonesia.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB/SDGs pada dasarnya selaras dengan RPJMD 2016-2021 untuk mewujudkan Provinsi Sulawesi Tengah yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2020 dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2020, maka tema Pembangunan Daerah Tahun 2020 adalah: **"Membangun Kembali Sulawesi Tengah Melalui Penguatan Mutu Modal Manusia dan Infrastruktur"**.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 (tiga) agenda prioritas pembangunan daerah Tahun 2020, yakni Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Jaringan Infrastruktur.

Prioritas pembangunan daerah yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan arah dan fokus pembangunan dan sekaligus menjawab tantangan pembangunan daerah yang dihadapi saat ini oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah, dan sekaligus menjadi agenda utama pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021.

**Tabel 4.10**  
**Prioritas Pembangunan Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah**

No	Prioritas RPJMD Sulteng Tahun 2016-2021	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020
1	Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Serta Terwujudnya Kepastian Hukum Dan Perlindungan HAM	Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Serta Terwujudnya Kepastian Hukum Dan Perlindungan HAM
2	Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan	Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan,
3	Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota	Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota
4	Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan	Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan
5	Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial	Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial
6	Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan Market Friendly	Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan Market Friendly
7	Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing	Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing
8	Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan
9	Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal	Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Prioritas RPJMD Sulteng Tahun 2016-2021	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020
	(SPM)	
10	Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau Dan Berkualitas	Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau Dan Berkualitas

Selanjutnya, kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur diprioritaskan untuk pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut.

<b>Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional</b>
<p><b>PERHUBUNGAN UDARA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Bandara Ampana di Kabupaten Tojo Una-una*</li> <li>2. Pengembangan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir-Luwuk</li> <li>3. Pengembangan Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu</li> <li>4. Pembangunan Bandara Morowali</li> </ol>
<p><b>Perhubungan Laut</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Pelabuhan Pantoloan</li> <li>2. Pengembangan Pelabuhan Poso</li> <li>3. Pengembangan Pelabuhan Toli - toli</li> <li>4. Pengembangan Pelabuhan Moutong Parigi</li> <li>5. Pengembangan Pelabuhan Kolonadale</li> <li>6. Pengembangan Pelabuhan Teluk Malala</li> <li>7. Pengembangan Pelabuhan Ogoamas</li> <li>8. Pengembangan Pelabuhan Leok</li> <li>9. Pengembangan Pelabuhan Matagisi</li> </ol>
<p><b>JALAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Jalan Luwuk - Batul - Moilong-Rata-Baturube</li> <li>2. Pembangunan Jalan Pepe - Tomata</li> <li>3. Pembangunan Jalan Palu-Parigi (Bypass)</li> <li>4. Pembangunan Jalan Poros Soroako – Bahodopi (Industri Morowali)</li> <li>5. Pembangunan Jalan Salakan-Sambut</li> <li>6. Pembangunan Jalan Akses Pendukung Kawasan Industri Konawe</li> <li>7. Pembangunan <i>Flyover</i> Pantoloan</li> <li>8. Pembangunan Jalan Lingkar Kota Palu</li> </ol>
<p><b>ASDP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Donggala</li> <li>2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bambaesa</li> <li>3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Amalengo</li> </ol>



4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Labuan
5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kolonedale
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Baturube
7. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Ampana
8. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kabonga
9. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pasokan
10. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Banggai

**KETENAGALISTRIKAN**

1. PLTU Palu 3 100 MW
2. PLTMG Luwuk 40 MW
3. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi

**TELEKOMUNIKASI DAN INFROMATIKA**

1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

**SUMBER DAYA AIR**

1. Pembangunan D.I. Sibeia (3.321 Ha) Kab. Parigi Moutong
2. Pembangunan D.I. Binsil (1.510 Ha) Kab. Parigi Moutong
3. Pembangunan D.I. Meko (2.800 Ha) Kab. Poso Kab. Poso
4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lambunu (Saluran, Jalan Inspeksi) Kab. Parigi Moutong
5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gumbasa (tahap I) (Saluran Induk, Saluran Sekunder) Kab. Sigi
6. Pembangunan Tanggul Sungai Puna Kab. Poso
7. Pembangunan Revetment Pantai Kab. Donggala Kab. Donggala
8. Pembuatan Tanggul Penahan Tebing Danau Poso Danau poso, Kab. Poso
9. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Transmisi Air Baku Sungai Saluki Gumbasa SPAM Regional PASIGALA (Tahap V) Kab. Sigi
10. Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air baku Sungai Tandayo Donggala
11. Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air baku Sungai Tunu Donggala
12. Pembuatan Tanggul Penahan Tebing Danau Poso Danau poso, Kab. Poso

**PENDIDIKAN**

1. Pembangunan SMK Pertanian
2. Pembangunan SMK Perikanan dan Kelautan
3. Peningkatan kapasitas guru produktif SMK Pertambangan
4. Pembangunan lembaga PAUD (TK,TPA)

5. Penyediaan BOP dan APE PAUD

**KESEHATAN**

1. Pelayanan Kesehatan Rujukan (5 wilayah dan 1 provinsi).
2. Penyediaan RS bergerak di Pulau Banggai Laut dan Banggai Kepulauan
3. Pembangunan baru RS Pratama di Banggai Kepulauan dan Morowali
4. Peningkatan SDM kesehatan (dokter, bidan, perawat, tenaga gizi dan analis kesehatan)
5. Peningkatan ketersediaan dokter spesialis terutama dokter spesialis jantung di fasilitas kesehatan
6. Peningkatan jumlah Puskesmas
7. Penanganan kasus HIV pada kelompok Ibu RT
8. Penguatan laboratorium kesehatan (peralatan dan bangunan) di tingkat Provinsi
9. Penanganan penyakit schistosomiasis
10. Pengadaan layanan mobile untuk layanan kesehatan reproduksi

**PERUMAHAN**

1. Rusunawa KEK Palu 2TB, Muruwali 2TB, Morowali Utara 2TB
2. IKK Tangkuran (Kab. Poso)
3. SPAM Khusus (Pulau Terluar) Pulau Lingayan (Kab. Toli-Toli),
4. TPA Regional Kota Palu-Kab Sigi